

Politik NU

Baru dalam perkembangannya sebagai
dalam menentukan proses-proses politik,
dalam masyarakat. Walaupun demikian
belum sepakat tentang karakter negara Orde
Baru semuanya sependapat bahwa Orde Baru
sebagai otoritas yang otonom dan
"mengatasi" dan "mengawasi" masyarakat
besar disebabkan oleh kemampuan Orde Baru
realisasikan konsep "negara kuat" (*strong*)
jatuhnya rezim Orde Lama di bawah peme-

A. Paradigma Politik NU

Orde Baru dalam perkembangannya sebagai pemain penting dalam menentukan proses-proses politik, ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Walaupun demikian para pengamat belum sepakat tentang karakter negara Orde Baru. Namun hampir semuanya sependapat bahwa Orde Baru tumbuh dan berkembang sebagai otoritas yang otonom dan berada dalam posisi "mengatasi" dan "mengawasi" masyarakat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan Orde Baru untuk merealisasikan konsep "negara kuat" (*strong state*) menyusul jatuhnya rezim Orde Lama di bawah pemerintahan Sukarno.

Pertumbuhan negara kuat di bawah Orde Baru menjadi berkembang karena didukung beberapa hal: *Pertama*, muncul dan terbentuknya elit politik baru yang kohesif terdiri dari militer, birokrasi, kaum teknokrat dan pemilik modal nasional, baik pribumi dan non-pribumi. *Kedua*, dukungan kuat setidaknya pada periode awal, dari kelompok anti komunis dan anti Sukarno; yaitu arus bawah yang selama

rezim Sukarno mengalami tekanan ekonomi dan konflik sosial. Ketiga, opini yang positif dan dukungan kuat dari negara-negara luar, terutama blok Barat, yang kemudian diwujudkan melalui berbagai paket bantuan dan dukungan politik.

Semenjak Orde Baru didirikan, kekuasaan negara memang semakin tumbuh dan pesat secara efektif serta bisa menentukan tata kehidupan masyarakat. Intervensi-intervensi negara dalam proses-proses politik, ekonomi dan sosial menjadi kenyataan yang sulit dipungkiri. Kasus-kasus intervensi aparat negara dalam konflik internal partai politik misalnya, PDI dan PPP, dan meningkatnya proses birokratisasi dalam pengelolaan ekonomi dan kehidupan masyarakat, serta pendekatan keamanan dalam menangani konflik-konflik sosial dan politik dalam masyarakat, kesemuanya menandai kecenderungan hegemonik dari negara Orde Baru. Hal ini serta merta membawa akibat samping pada masyarakat dengan terpinggirkannya peran masyarakat dan menurunnya kemandirian organisasi kemasyarakatan dan politik secara khusus.

Di dalam konjungtur politik ekonomi demikian, NU dipertautkan keberadaannya. NU sebelum melakukan keputusan untuk kembali pada awal misi berdirinya (khittah 1926) dengan mengambil strategi terlibat langsung dalam politik

praktis, NU secara terus menerus dihadapkan pada berbagai kepentingan struktural yang melahirkan konflik berkepanjangan. Organisasi seperti NU, dengan memiliki basis massa bawah, secara otomatis akan senantiasa mengundang kecurigaan negara dengan pengawasan ketat melalui kebijakan eksklusif terhadap sektor-sektor populer, termasuk massa dipedesaan.

Pada tingkat elit, negara akan menggunakan berbagai cara, termasuk di dalamnya kooptasi dan represi dalam melakukan kontrol terhadapnya. Kasus pertikaian NU dan MI jelas tidak hanya murni manifestasi konflik kepentingan internal. Tetapi juga merupakan arena dimana negara ikut mempertaruhkan kepentingan kontrolnya.

Dari basis sosial, NU berada pada kelas petani dan kapitalis pribumi. Politik ekonomi Orde Baru dengan meletakkan negara dalam posisi kuat dalam menentukan pembagian sumber daya dan akses ekonomi, berdampak positif bagi NU untuk tetap bertahan dalam posisi diluar struktur dengan negara. Kenyataan-kenyataan ini mempercepat aspirasi yang menuntut agar dilakukan peninjauan kembali satrategi posisi NU di dalam konstelasi politik ekonomi Orde Baru.

Upaya-upaya NU untuk melakukan serangkaian akomodasi terhadap kepentingan negara pada dimensi-dimensi politik, ekonomi; dengan demikian tak terpisahkan dari perkembangan

negara dan masyarakat di bawah Orde Baru. NU sebagai salah satu kekuatan strategis dalam masyarakat mau tak mau harus mengadakan penyesuaian agar tetap mampu bertahan berhadapan dengan kekuatan negara yang semakin dominan.

Dari dialog empiris di atas, menjadi jelas bahwa kiprah NU pasca khittah menitik beratkan pada kerja-kerja sosial budaya. Dan tanpa terduga relevansi NU pasca khittah akan mengalami penyesuaian dengan munculnya masyarakat sipil di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam potensi NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berbasis massa pedesaan dan peran informal para kiai di pesantren-pesantren.

Dalam hal ini, ide-ide yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh intelektual NU seperti Abdurrahman Wahid dan alm. KH Achmad Siddiq menjadi sangat urgen. Mereka dalam berbagai kesempatan mengemukakan pentingnya peninjauan kembali ide-ide khazanah kultural NU dalam konteks kekinian. Abdurrahman Wahid misalnya, memperkenalkan pesantren ke dunia luar melalui masuknya beberapa LSM ke pesantren-pesantren. Selanjutnya, LP3ES diambil patner dengan proyek pengembangan masyarakat melalui pesantren-pesantren yang berafiliasi ke NU. Pesantren An-Nuqaya, Guluk-guluk (Sumenep), Maslakul Huda, Kajen (Pati), Dua pesantren tersebut, upaya pengembangan diarahkan pada

satu dari entitas dalam masyarakat (seperti ekonomi, politik, budaya dll) saling tergantung sama lain. Bagi Gramsci, perubahan masyarakat sebagai hasil dari interaksi seluruh aspek masyarakat, ketimbang sebagai konsekuensi dari sebab aspek esensi tertentu.⁴

Dengan demikian, teori sosial yang diambil gerakan politik NU dalam bahasan sub-bab ini adalah gerakan transformasi sosial Gramscian berupa teori hegemoni dalam mengontrol kekuasaan dalam negara. Gramsci menggambarkan hegemoni dalam bentuk kekuasaan kelompok dominan dalam hal ini adalah asosiasi-asosiasi atau organisasi.⁵

Merejuk pada pembahasan di muka, ketika kondisi negara cenderung intervensionis dan menguasai masyarakat, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan berupaya kembali pada khittah 1926 di Mukhtamar Situbondo 1984; tanpa sengaja NU menempatkan posisi mengambil jarak dengan negara yang begitu hegemonik. Oleh karena itu, gerakan-gerakan sosial NU dilihat sebagai gerakan konvensional dengan tujuan, strategi dan metode baru dalam formula realitas empiris sosial. Dalam perspektif Gramscian, konsep organisasi gerakan sosial di kategorikan sebagai masyarakat sipil terorganisir. Konsep

⁴ Mansoor Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) h. 49.

⁵ 3744 n. 50.

masyarakat sipil didasarkan pada analisis Gramsci tentang kepentingan konfliktual dan dialektikal dalam negara dan masyarakat.⁶

Dari pengertian *civil society* di atas, maka ia terwujud dalam berbagai organisasi-organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar hegemoni negara. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Keagamaan (seperti NU, Muhammadiyah dll), paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan. Namun, tidak semua asosiasi tersebut memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau setidaknya mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi.

Dilihat dari kepentingan munculnya pertumbuhan *civil society* di Indonesia, NU setelah kembali ke khittah 1926 melakukan perubahan paradigma politik (dari kuantitas menuju kualitas), memperluas wilayah publik dan wacana dengan bekerjasama dan melakukan dialog terbuka dengan siapa saja yang memiliki keprihatinan bersama terhadap permasalahan dasar yang dihadapi bangsa Indonesia; yaitu masalah-masalah demokratisasi, keadilan ekonomi dan sosial, pembelaan hak-hak asasi manusia (*human rights*), pemberantasan kemiskinan dan kebodohan. Memperluas garapannya NU, dengan berpartisipasi dalam kiprah advokasi masyarakat bawah (*grass root*) melalui badan-badan otonom NU seperti Rabithah Ma'ad Islamiyah (RMI), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LKPSM) serta LSM-LSM dalam maupun luar negeri.

Dalam transformasi nilai-nilai Islam tradisional, NU

memelihara dan mengembangkan wawasan kultural melalui pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan yang dimiliki (LP Ma'arif) dapat mampu menjaga relevansinya dalam proses modernisasi dan pada saat yang sama memperbesar kontribusi kepentingan masyarakat luas. Pengkajian, penelitian dan pengembangan yang serius tentang pesantren termasuk sistem pendidikannya, dan relevansinya dalam dunia modern. Selain itu, NU membangun ekonomi alternatif (ekonomi kerakyatan sebagai wujud dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat BPR). Pendirian koperasi-koperasi di pesantren. Pelatihan keterampilan pada santri dan pendidikan wiraswasta. Dengan demikian, NU memberi kontribusi bagi usaha-usaha menuju kemandirian dan kepercayaan diri pada masyarakat bawah. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat sebagai warga negara ikut secara aktif terlibat memikirkan masalah keadilan sosial, ekonomi dan politik.